MEDIA KOMUNIKASI ANTARBANK NASIONAL

PERBANASNews

No. 160 Tahun 2026 | **Jul - Sept 2026**

Menjaga Kinerja, Memperkuat Peran dalam Transformasi Ekonomi

INKLUSI KEUANGAN untuk semua

AYO ke BANK

PERBANAS UTAMA

6 **Nakhoda Tangguh di Lautan Bergolak, Menjaga Resiliensi dan Intermediasi Perbankan**

Pelaut ulung tidak pernah dilahirkan dari laut yang tenang, melainkan dari samudra berombak garang yang menguji ketangguhan haluan kapal dan ketelitian membaca kompas.

ARTIKEL PERBANAS

09 **Bank BUMN Berbagi Peran dengan Bank Swasta**

Laju fungsi intermediasi industri perbankan pada jalur positif, meski di tengah tantangan gejolak ekonomi global dan domestik. Di balik resiliensi industri perbankan yang mampu membukukan pertumbuhan kredit agregat 13,58 persen hingga semester I/2026, tersimpan pembagian peran antara bank pelat merah dan bank swasta.

11 **Arah Kebijakan Ekonomi 2027: Dari Ekspansi Fiskal Menuju Transformasi Ekonomi**

Menyimak pidato Presiden, RAPBN 2027 tidak sekadar melanjutkan agenda pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Desain anggarannya menunjukkan upaya pemerintah menggeser sumber pertumbuhan menuju ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, berdaulat, dan ditopang oleh pendalaman sektor keuangan.

ARTIKEL PERBANAS

RAPBN 2027 - Babak Baru Intermediasi Perbankan: Mengawal Pembiayaan Transformasi Ekonomi **14**

Peran PFII dan Arah Strategis Perbankan Nasional **17**

Srikandi Nakhoda Baru Bank Indonesia: Menjaga Stabilitas Moneter dan Bersinergi dengan Bank Nasional **20**

KEGIATAN

CFO FORUM PERBANAS, 6-7 Agustus 2026 **26**

Pekan Olahraga Perbankan (Porbank) **27**

Penanaman Bibit Pohon 2 September 2026 **27**

Literasi Keuangan oleh KMPP PERBANAS dan PERBANAS **28**

Bankir Berbagi: Mengalirkan Kebaikan, Menyalurkan Harapan untuk Sesama **29**

SUPLEMEN

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG) TAHUN 2026 **23**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG) TAHUN 2024 - KONVENSIONAL **24**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG) - UNIT USAHA SYARIAH **25**

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (BANK NTT) **30**

DARI REDAKSI

PERBANASNews

No. 160 Tahun 2026
Juli - September 2026

PENERBIT
Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)

PELINDUNG
Badan Pengurus PERBANAS

REDAKSI
Anika Faisal
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA
Eka Sri Dana Afriza
Andry Asmoro
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI
Wara Sri Indriani

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN
Cover
Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna
• 1 halaman: Rp5.000.000,00
Isi
• 1 halaman: Rp4.500.000,00
• ½ halaman: Rp2.250.000,00

PERBANASNews menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN
Griya PERBANAS Lantai 1
Jalan PERBANAS, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5223037, 5223038
website: www.PERBANAS.org
e-mail: sekretariat@PERBANAS.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/STT/1993,
2 September 1993

Menjaga Kinerja, Memperkuat Peran dalam Transformasi Ekonomi

Perekonomian nasional memasuki fase yang semakin penting. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan arah kebijakan moneter dan fiskal, serta kebutuhan untuk mempercepat transformasi struktural, industri perbankan dituntut tidak hanya menjaga ketahanan, tetapi juga memperkuat perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi.

PERBANAS News edisi 160, September 2026, hadir dengan laporan utama yang mengangkat perkembangan kinerja industri perbankan sekaligus melihat lebih jauh bagaimana industri merespons berbagai agenda ekonomi nasional. Tema ini relevan karena perbankan berada pada posisi strategis: menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan pembiayaan tersedia bagi dunia usaha dan masyarakat.

Laporan utama edisi ini menghadirkan dua artikel yang secara lebih mendalam mengulas kinerja perbankan. Perkembangan hingga pertengahan 2026 menunjukkan penguatan fungsi intermediasi. Pertumbuhan kredit pada Juli 2026 mencapai 13,58% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 11,21%. Pada saat yang sama, kualitas kredit tetap relatif terjaga dengan NPL gross sebesar 2,1%.

Angka-angka tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan industri untuk terus menjalankan fungsi intermediasi di tengah perubahan lingkungan ekonomi. Namun, pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada penghimpunan dana juga membawa konsekuensi: pengelolaan likuiditas, biaya dana, kualitas aset, dan manajemen risiko menjadi semakin penting. Dengan demikian, pertumbuhan tidak semata-mata dilihat dari besarnya ekspansi kredit, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan intermediasi.

Perspektif tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan arah kebijakan ekonomi dalam RAPBN 2027. Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap PDB.

Bagi industri perbankan, arah tersebut membuka ruang sekaligus tanggung jawab yang besar. Agenda hilirisasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, penguatan UMKM, hingga ekonomi desa membutuhkan pembiayaan dengan karakter yang semakin beragam. Perbankan tidak hanya dituntut menyalurkan kredit, tetapi juga memahami kebutuhan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru dan mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristiknya.

Karena itu, artikel mengenai RAPBN 2027 dalam edisi ini tidak berhenti pada pembahasan angka-angka fiskal. Artikel tersebut melihat bagaimana kebijakan anggaran pemerintah dapat berinteraksi dengan fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam menciptakan ruang bagi pembiayaan sektor riil dan investasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan, kesehatan industri, kecukupan likuiditas, dan prinsip kehati-hatian.

Edisi ini juga mengangkat gagasan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah memproyeksikan PFII sebagai pusat kegiatan keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional, dengan cakupan kegiatan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, *fintech*, keuangan syariah, *family office*, *treasury center*, dan manajemen investasi.

Bagi industri jasa keuangan, PFII menghadirkan perspektif baru mengenai upaya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan regional dan global. Kehadiran pusat finansial berstandar internasional pada akhirnya akan sangat bergantung pada kualitas regulasi, kepastian hukum, infrastruktur, talenta, konektivitas, serta daya saing ekosistem keuangan secara keseluruhan. Perbankan nasional memiliki ruang untuk menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem tersebut.

PERBANAS News juga menghadirkan artikel mengenai Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kepemimpinan bank sentral merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks saat ini, koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi semakin relevan, terutama ketika kebutuhan pembiayaan ekonomi terus meningkat. Perkembangan terkini juga menunjukkan pentingnya sinergi dalam pengelolaan likuiditas sistem perbankan.

Keseluruhan artikel dalam edisi September ini memperlihatkan satu benang merah: perbankan berada di persimpangan antara menjaga ketahanan hari ini dan mempersiapkan pembiayaan bagi ekonomi masa depan.

Menjaga kinerja tetap kuat merupakan fondasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kekuatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kapasitas pembiayaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Ketika Indonesia memasuki fase transformasi ekonomi yang semakin intensif, industri perbankan memiliki peran strategis untuk menjembatani kebijakan dengan aktivitas ekonomi—menghubungkan likuiditas dengan investasi, tabungan dengan pembiayaan, serta agenda pembangunan dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan industri bukan hanya seberapa besar aset dan kredit tumbuh, tetapi juga seberapa jauh intermediasi perbankan mampu berkontribusi terhadap penguatan fondasi ekonomi nasional. (*)

Nakhoda Tangguh di Lautan Bergolak, Menjaga Resiliensi dan Intermediasi Perbankan

Pelaut ulung tidak pernah dilahirkan dari laut yang tenang, melainkan dari samudra berombak garang yang menguji ketangguhan haluan kapal dan ketelitian membaca kompas.

Pameo pelaut klasik tersebut menemukan relevansinya pada potret industri perbankan nasional sepanjang tahun 2026. Menghadapi gelombang pasang suku bunga global yang tertahan tinggi serta riak pelemahan daya beli di perairan domestik, kapal perbankan Indonesia menolak terombang-ambing pasrah. Berbekal lunas kapal permodalan yang tebal dan layar teknologi yang terkembang dinamis, nakhoda industri keuangan tanah air justru berhasil membelah badai dan mencatatkan laju intermediasi yang mengagumkan.

Ujian pertama yang dihadapi perbankan berakar dari lanskap makroekonomi global yang belum sepenuhnya terbebas dari rezim suku bunga tinggi (*higher for longer*). Bank-bank sentral negara maju masih mempertahankan sikap moneter yang ketat guna menjinakkan inflasi struktural yang dipicu oleh fragmentasi geopolitik serta kenaikan biaya rantai pasok energi dan logistik internasional.

Kondisi ini tidak hanya menahan laju penurunan suku bunga acuan di berbagai belahan dunia, tetapi juga memicu volatilitas aliran modal portofolio dan menekan nilai tukar rupiah pada rentang Rp17.500,00 hingga Rp17.760,00 per dolar Amerika Serikat. Bagi industri perbankan, situasi ini menaikkan biaya dana (*cost of funds*) dan menuntut kehati-hatian ekstra dalam mengelola likuiditas valuta asing maupun rupiah.

Di ranah domestik, tantangan bertiup dari pelemahan daya beli masyarakat di segmen berpenghasilan menengah dan bawah. Fenomena "makan tabungan" mulai tampak di permukaan, di mana sebagian keluarga terpaksa mencairkan simpanan likuid demi mempertahankan standar kebutuhan pokok harian.

Tren ini berdampak langsung pada melambatnya laju pertumbuhan rekening simpanan bernominal kecil. Di saat bersamaan, sektor korporasi yang bertumpu pada ekspor komoditas ekstraktif seperti nikel dan batu bara harus menyesuaikan margin usaha akibat normalisasi harga di pasar dunia.

Kondisi tersebut menempatkan bankir pada dilema klasik, bagaimana menjaga mesin intermediasi tetap berputar kencang tanpa tergelincir ke dalam pembengkakan aset bermasalah.

Di tengah kondisi tersebut, fakta empiris membuktikan bahwa industri perbankan nasional memiliki daya lentur yang luar biasa. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per Juli 2026, fungsi intermediasi perbankan tidak sekadar bertahan, melainkan melesat melampaui ekspektasi konsensus awal tahun.

Penyaluran kredit perbankan per Juli 2026 tumbuh sebesar 13,58 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*), dengan total baki debet menembus Rp9.135 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan pertumbuhan Juni 2026 yang sebesar 12,67 persen yoy maupun realisasi Mei 2026 di level 11,51 persen yoy.

Akselerasi kredit tersebut ditopang oleh performa kredit investasi yang terbang tinggi hingga mencatatkan pertumbuhan 25,13 persen yoy. Dari sudut pandang kelompok debitur, kredit korporasi menjadi lokomotif penghela utama dengan lonjakan ekspansi mencapai 22,10 persen yoy.

Korporasi nasional bergerak agresif mengeksekusi proyek hilirisasi bernilai tambah, modernisasi infrastruktur pabrik, penguatan ketahanan pangan terpadu, serta instalasi energi baru terbarukan. Besarnya optimisme pelaku usaha ini tercermin pula dari tingginya komitmen fasilitas kredit yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) yang mencapai Rp2.575 triliun, menyediakan bantalan ekspansi pembiayaan yang tebal untuk paruh kedua tahun berjalan.

Di sisi pendanaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bertengger di angka Rp10.294 triliun dengan pertumbuhan stabil di level 11,40 persen yoy. Likuiditas perbankan tetap berada dalam kondisi yang sangat memadai untuk memitigasi kejutan pasar, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 124,30 persen dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) di level 27,80 persen—jauh di atas batas minimum regulasi masing-masing 50 persen dan 10 persen.

Parameter Kunci Perbankan	Akhir 2025	Posisi Juli 2026
Pertumbuhan Kredit (yoy)	9,63%	13,58%
Pertumbuhan DPK (yoy)	13,83%	11,40%
Total Nominal Kredit (Rp Triliun)	8.350,20	9.135,00
Total Nominal DPK (Rp Triliun)	9.712,40	10.294,00
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,87%	23,84%
Rasio NPL Gross	2,05%	2,17%
Rasio NPL Net	0,79%	0,84%
Rasio Loan at Risk (LaR)	9,45%	8,39%
Alat Likuid / Non-Core Deposit (AL/NCD)	126,15%	124,30%
Alat Likuid / DPK (AL/DPK)	28,57%	27,80%

Sumber: Diolah dari Laporan Profil Industri Perbankan OJK, Data Moneter Bank Indonesia, dan Laporan Keuangan Bank Umum Publikasi.

"Kinerja industri perbankan tetap bertumbuh secara sehat dan stabil dengan profil risiko yang sangat terjaga di tengah volatilitas pasar global. OJK senantiasa mengharapkan dan mendorong agar perbankan nasional dapat terus berkembang dan bertumbuh tinggi, namun fondasinya harus tetap dilandasi oleh penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), manajemen risiko yang kokoh, serta tata kelola yang baik," tutur Dian Ediana.

Kualitas kredit yang terjaga menjadi sinyal paling meyakinkan bagi para pengamat. Rasio *Loan at Risk* (LaR) konsisten melandai ke level 8,39 persen pada Juli 2026 dari 8,47 persen pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren pemulihan dari era pandemi. Rasio kredit macet (NPL gross) yang bertahan di level 2,17 persen dan NPL net 0,84 persen membuktikan berjalannya fungsi kurasi debitur secara ketat. Permodalan bank umum yang tercatat dengan rasio kecukupan modal (CAR) 23,84 persen menjamin kapasitas perbankan menyerap potensi guncangan eksternal sekaligus memberi keleluasaan melakukan ekspansi aset produktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa ketahanan industri perbankan berakar pada kepatuhan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang konsisten.

Transformasi Digital

Bagaimana perbankan mempertahankan laba bersih bernilai puluhan triliun rupiah di saat margin bunga bersih (*Net Interest Margin*/NIM) tertekan oleh persaingan suku bunga simpanan? Jawabannya terletak pada revolusi *platform* digital dan restrukturisasi bauran dana pihak ketiga.

Aplikasi *mobile banking* dan solusi transaksi digital korporasi (*cash management platform*) telah bermutasi menjadi instrumen strategis untuk menjaring dana murah giro dan tabungan

(*Current Account Saving Account*/CASA). Bank-bank papan atas kini mampu mempertahankan rasio CASA di atas 70 persen hingga 80 persen dari total DPK mereka. Struktur dana murah ini menjadi perisai efektif yang melindungi margin pendapatan bank dari mahalnya biaya deposito berjangka.

Lompatan transaksi digital tersebut dikonfirmasi oleh data Bank Indonesia yang mencatat agregat volume pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi (tumbuh 28,14 persen yoy) pada pertengahan 2026, ditopang oleh transaksi QRIS yang melonjak fantastis sebesar 95 persen yoy. Keberhasilan migrasi transaksi kas ke kanal digital komputasi awan berhasil menekan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) industri perbankan turun ke kisaran 76,80 persen dari sebelumnya 79,24 persen.

Parameter Digitalisasi dan Efisiensi Industri	Semester I-2025	Semester I-2026	Pertumbuhan Relatif (%)
Agregat Volume Transaksi Pembayaran Digital	4,07 Miliar Transaksi	5,22 Miliar Transaksi	+28,14%
Pertumbuhan Tahunan Transaksi QRIS	+68,20% yoy	+95,00% yoy	Akselerasi Masif
Basis Pengguna Mobile Banking Nasional	134,8 Juta Akun	172,5 Juta Akun	+27,97%
Rata-Rata Nilai Kliring BI-FAST Per Bulan	Rp710 Triliun	Rp965 Triliun	+35,91%
Rasio Rata-Rata BOPO Bank Umum Komersial	79,24%	76,80%	-2,44%
Kontribusi Fee-Based Income terhadap Pendapatan	18,50%	23,10%	+4,60%

Sumber: Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kompilasi Laporan Publikasi Bank Umum Terbuka.

Ketua PERBANAS Hery Gunardi menggarisbawahi bahwa kapabilitas teknologi bukan lagi opsi pelengkap, melainkan prasyarat mutlak bagi perbankan untuk memimpin persaingan dan menjaga keberlanjutan bisnis.

"Era digitalisasi ibarat pedang bermata dua bagi dunia perbankan. Di satu sisi, teknologi memberikan lompatan efisiensi, memperluas jangkauan nasabah hingga ke pelosok, serta mendiversifikasi pendapatan berbasis komisi. Namun di sisi lain, perbankan dituntut menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat keamanan siber dan perlindungan data nasabah. Bank yang mampu memadukan inovasi teknologi dengan kepatuhan manajemen risiko yang kuat adalah bank yang akan tampil sebagai pemenang dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi," tegas Hery Gunardi yang juga menjabat Direktur Utama Bank BRI.

Diversifikasi ke pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*), mulai dari jasa transaksi digital, administrasi sindikasi, hingga manajemen aset korporasi, kini menyumbang lebih dari 23 persen pendapatan operasional bank, memberikan bantalan penyeimbang yang kokoh di tengah gejolak pasar suku bunga.

Mitigasi Risiko

Kendati catatan statistik menggambarkan performa yang impresif, para pemangku kepentingan industri perbankan sepakat bahwa ruang untuk berpuas diri sangat terbatas. Penurunan daya beli yang melanda masyarakat kelas menengah serta perlambatan di sektor konsumsi menuntut bank-bank untuk tidak ceroboh dalam melonggarkan kriteria kelayakan kredit (*credit underwriting*).

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi PERBANAS Aviliani mengingatkan pentingnya sikap selektif dalam menavigasi ekspansi bisnis di tengah dinamika daya beli dan pemulihan sektor riil.

"Perbankan saat ini bersikap sangat realistis dan rasional. Meskipun likuiditas dan permodalan kita sangat kuat, perbankan tidak bisa menyalurkan kredit secara membabi buta ke sektor-sektor yang daya serap pasarnya masih lemah. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bukanlah opsi yang bisa ditawar, melainkan kewajiban mutlak. Pembiayaan harus diarahkan pada rantai pasok industri yang memiliki ekosistem hilir yang jelas dan berdaya tahan tinggi," jelasnya.

Aviliani menambahkan bahwa perbaikan kredit di segmen mikro dan konsumsi memerlukan sinergi kebijakan struktural. Aktivitas belanja produktif, penciptaan lapangan kerja formal, dan stabilisasi harga komoditas pangan pokok menjadi prasyarat esensial agar daya beli masyarakat bawah pulih, yang pada gilirannya akan mengembalikan gairah kredit konsumer dan UMKM.

Merujuk kembali pada hukum pelayaran: badai tidak selamanya mengamuk di samudra lepas, namun kapal yang tangguh akan selalu siap menghadapi setiap perubahan mata angin. Dengan rasio modal 23,84 persen sebagai jangkar penyelamat dan akselerasi platform digital sebagai kemudi modern, perbankan nasional telah membuktikan bahwa lautan bergolak tahun 2026 bukanlah penghalang ekspansi. Menatap horison tahun 2027, armada perbankan Indonesia siap terus berlayar memimpin konvoi ekonomi nasional menuju pelabuhan kemakmuran yang lebih berkeadilan. (**)

Bank BUMN Berbagi Peran dengan Bank Swasta

Laju fungsi intermediasi industri perbankan pada jalur positif, meski di tengah tantangan gejolak ekonomi global dan domestik. Di balik resiliensi industri perbankan yang mampu membukukan pertumbuhan kredit agregat 13,58 persen hingga semester I/2026, tersimpan pembagian peran antara bank pelat merah dan bank swasta.

Jika membedah data statistik industri perbankan pada paruh pertama tahun ini, ada sebuah realitas yang menarik. Roda reindustrialisasi di sektor riil saat ini digerakkan lebih oleh kelompok bank swasta.

Berdasarkan posisi penyaluran kredit Juli 2026, bank swasta tercatat mengucurkan kredit sebesar Rp823,1 triliun kepada industri pengolahan. Portofolio ini jauh mengungguli ekspansi bank persero yang tercatat sebesar Rp482,3 triliun.
Arus likuiditas ini menegaskan posisi bank swasta sebagai tulang punggung utama bagi korporasi yang tengah mengeksekusi proyek hilirisasi dan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas pabrik.

Sebaliknya, bank BUMN sebagai katalis proyek infrastruktur dan komoditas hulu. Pada periode yang sama, baki debet bank persero untuk sektor konstruksi tercatat dominan mencapai Rp397,3 triliun.

Sebagai perbandingan, ekspansi bank swasta di sektor konstruksi bergerak jauh lebih konservatif, yakni di angka Rp149,02 triliun. Pola serupa terlihat pada sektor pertambangan dan penggalian.

Bank persero terlihat memimpin pembiayaan di sektor ini dengan total kredit mencapai Rp247,28 triliun, meninggalkan porsi bank swasta nasional yang berada di level Rp141,5 triliun.

Membagi Strategi di Sektor Investasi, Modal Kerja, dan Konsumsi

Apabila ditilik lebih dalam, hipotesis bahwa bank swasta bertindak sebagai motor utama reindustrialisasi, sementara bank BUMN menjadi penopang infrastruktur dan konsumsi domestik, tampak valid.

Hal itu terlihat dari struktur kredit perbankan berdasarkan jenis penggunaannya. Data penyaluran kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi per Juli 2026 memperlihatkan perbedaan yang sangat kontras di antara kedua kelompok bank tersebut.

Komparasi Total Kredit Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Utama (Juli 2026)

Sektor Lapangan Usaha (KBLI)	Bank Persero (Miliar Rp)	Bank Swasta Nasional (Miliar Rp)
Industri Pengolahan (Manufaktur)	474.434	781.619
Perdagangan Besar & Eceran	631.711	510.848
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	435.435	117.947
Konstruksi	389.728	145.995
Jasa Keuangan dan Asuransi	109.359	303.070
Pertambangan dan Penggalian	269.466	144.387
Transportasi dan Pergudangan	187.230	128.566
Real Estate	102.002	167.339

Dari sisi kredit investasi yang mencerminkan komitmen perbankan dalam membiayai ekspansi jangka panjang, seperti pembangunan pabrik baru atau proyek infrastruktur berskala besar. Di sini terlihat 'pembagian beban kerja' antara bank pelat merah dan swasta.

Untuk sektor manufaktur, bank swasta memimpin penyaluran kredit investasi sebesar Rp225,06 triliun pada Juli 2026. Angka ini mengungguli bank persero yang menyalurkan Rp189,63 triliun di sektor yang sama.

Sebaliknya, pada sektor konstruksi, bank persero tampil dominan dengan kucuran kredit investasi mencapai Rp212,56 triliun. Jumlah ini berbanding terbalik dengan bank swasta yang bergerak jauh lebih konservatif di sektor konstruksi, yakni sebesar Rp59,2 triliun.

Adapun dari sisi kredit modal kerja yang digunakan sebagai pelumas perusahaan untuk membeli bahan baku dan operasional korporasi sehari-hari terlihat dominasi bank swasta di sektor manufaktur.

Pada Juli 2026, bank swasta menyalurkan kredit modal kerja industri pengolahan hingga menembus Rp556,56 triliun. Angka ini nyaris dua kali lipat dari portofolio pembiayaan modal kerja manufaktur yang disalurkan oleh bank BUMN, yakni Rp284,8 triliun miliar.

Di pos yang lain, bank persero tetap setia menjaga likuiditas pada operasional proyek-proyek infrastruktur. Bank pelat merah memompa Rp177,17 triliun untuk kredit modal kerja sektor konstruksi. Porsi ini mendominasi pasar, menekan kelompok bank swasta yang mengalokasikan Rp86,68 triliun untuk modal kerja konstruksi.

Dengan ekspansi kredit besar-besaran di sektor infrastruktur dan konstruksi yang memiliki karakteristik *long-term* dan berisiko tinggi terhadap mismatch, bank

Komparasi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (Juli 2026)

Jenis Penggunaan Kredit	Bank Persero (Miliar Rp)	Bank Swasta Nasional (Miliar Rp)
Kredit Investasi	1.545.316	983.619
Kredit Modal Kerja	1.610.768	1.739.522
Kredit Konsumsi (Rupiah & Valas)	1.129.803	719.989

persero membutuhkan penyeimbang dari sisi aset. Jawabannya ditemukan pada kredit konsumsi.

Data menunjukkan bahwa bank persero menjadi penguasa mutlak di segmen ini. Total baki debet kredit konsumsi bank persero pada Juli 2026 mencapai angka sebesar Rp1.129,8 triliun.

Sebagai perbandingan, bank swasta nasional menyalurkan kredit konsumsi yang jauh lebih kecil, yakni sebesar Rp719,99 triliun pada periode yang sama.

Penguasaan atas kredit konsumsi, yang mayoritas berupa KPR dan pembiayaan payroll/pension, memberikan bank BUMN basis aset dengan tingkat yield yang stabil dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang relatif dapat diprediksi, guna menetralisir volatilitas dari pembiayaan infrastruktur.

Sinergi Dua Mesin Pertumbuhan

Dengan melihat data itu, bank swasta tidak sekadar 'lebih banyak' menyalurkan kredit ke manufaktur, tetapi secara konsisten mendanai fondasi pabriknya (investasi) sekaligus memutar mesin harian pabrik tersebut (modal kerja).

Di sisi lain, BUMN mengambil porsi berisiko tinggi untuk membangun jalan, pelabuhan, dan bendungan (konstruksi), lalu memitigasi risiko tersebut dengan menguasai portofolio ritel masyarakat (konsumsi).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya kehati-hatian (*prudential banking*) dan menjaga keseimbangan portofolio asset agar rapor positif (profitabilitas) industri perbankan tetap bertahan.
"OJK juga mendorong perbankan untuk menjalankan strategi bisnis yang sehat dan berkelanjutan, termasuk melalui optimalisasi struktur pendanaan, peningkatan efisiensi, pengelolaan risiko yang baik, serta pertumbuhan kredit yang berkualitas," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam paparan Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), 23 September 2026.

Adapun Bank Indonesia (BI) melihat tingginya minat perbankan dalam mengucurkan kredit sangat berguna untuk menegaskan optimisme likuiditas. Menurut BI, minat penyaluran kredit bank masih longgar serta didukung pertumbuhan dana yang mencapai 10,94% (yoy).

"BI akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Gubernur BI Destry Damayanti, dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), 23 September 2026. (**)

Arah Kebijakan Ekonomi 2027: Dari Ekspansi Fiskal Menuju Transformasi Ekonomi

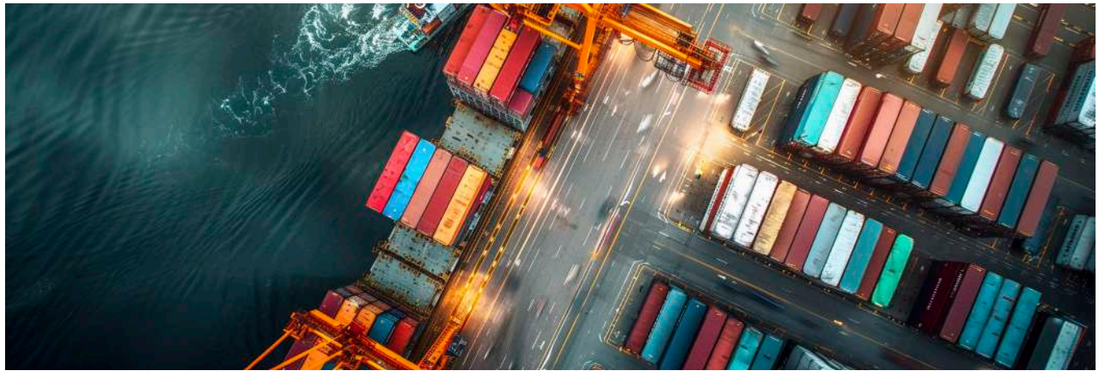

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyampaikan pokok-pokok kebijakan RAPBN 2027 kepada DPR. Menyimak pidato Presiden, RAPBN 2027 tidak sekadar melanjutkan agenda pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Desain anggarannya menunjukkan upaya pemerintah menggeser sumber pertumbuhan menuju ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah, berdaulat, dan ditopang oleh pendalaman sektor keuangan. Tantangannya adalah memastikan ekspansi fiskal tersebut menghasilkan produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang nyata.

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI pada 14 Agustus 2026, pesan yang muncul bukan semata mengenai besaran anggaran. RAPBN 2027 dirancang sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi ekonomi sekaligus mempertahankan disiplin fiskal.

Presiden menyebut arsitektur RAPBN 2027 tetap ekspansif, tetapi dijalankan secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong "Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat". Kerangka tersebut bertumpu pada sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara; penguatan transformasi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi; efektivitas program prioritas; perlindungan sosial yang lebih andal; pemberdayaan UMKM; serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dengan demikian, arah ekonomi 2027 dapat dibaca sebagai perpaduan antara ekspansi fiskal dan konsolidasi kualitas belanja. Pemerintah ingin tetap mendorong pertumbuhan, tetapi dengan ruang fiskal yang lebih terukur dan orientasi yang semakin kuat pada produktivitas.

Ekspansif, tetapi dengan Disiplin Fiskal

Secara nominal, RAPBN 2027 memperlihatkan ekspansi yang cukup signifikan. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun.

Yang menarik adalah ekspansi belanja tersebut berjalan bersama dengan penurunan target defisit. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68%.

Kombinasi tersebut menunjukkan dua sasaran yang berjalan bersamaan. Pertama, pemerintah masih membutuhkan kebijakan fiskal yang cukup aktif untuk menjaga momentum pertumbuhan. Kedua, ekspansi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pelebaran defisit tanpa batas.

Dalam konteks ini, kualitas belanja menjadi sama pentingnya dengan besaran belanja. Pemerintah secara eksplisit menempatkan optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan sebagai bagian dari arsitektur RAPBN 2027.

Target makro juga memperlihatkan ambisi tersebut. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 5,9%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi dijaga pada 2,5%, sementara asumsi nilai tukar ditetapkan sekitar Rp17.500 per dolar AS dan imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9%.

Artinya, pemerintah memasuki 2027 dengan kombinasi kebijakan yang mencoba menjaga pertumbuhan tanpa mengabaikan stabilitas makro.

Dari Belanja ke Transformasi Ekonomi

Perubahan penting dalam RAPBN 2027 terlihat dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN. Kedelapan agenda tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Jika dicermati, agenda tersebut tidak hanya berorientasi pada konsumsi pemerintah. Sebagian besar diarahkan untuk membangun kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi dalam jangka menengah-panjang.

Hal itu terlihat dari sejumlah program yang diumumkan Presiden. Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas, membangun atau merevitalisasi 441 RSUD, mempercepat renovasi sekolah, mengembangkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, mengoptimalkan aset BUMN, membangun 100 GW energi surya, serta mengembangkan Indonesia Financial Center.

Dengan kata lain, belanja negara diarahkan bukan sekadar untuk menciptakan permintaan dalam jangka pendek, tetapi juga memperbaiki supply side perekonomian.

Ini penting karena pertumbuhan 5,9% tidak akan berkelanjutan apabila hanya mengandalkan konsumsi dan belanja pemerintah. Pertumbuhan yang lebih tinggi membutuhkan produktivitas, investasi, kapasitas industri, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang lebih baik.

Efisiensi Menjadi Sumber Ruang Fiskal Baru

Salah satu aspek paling penting dalam RAPBN 2027 adalah upaya menjadikan efisiensi sebagai sumber tambahan ruang fiskal.

Presiden menyoroti konsolidasi pengadaan pemerintah. Data LKPP menunjukkan efisiensi konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah mencapai 20,86% pada 2025 dan 25,43% pada 2026. Jika konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, dan praktik pengadaan terbaik diterapkan secara luas, pemerintah memperkirakan potensi efisiensi mencapai sekitar 30% dari belanja pengadaan barang dan jasa senilai Rp1.200 triliun, atau sekitar Rp360 triliun.

Angka tersebut perlu dibaca sebagai potensi efisiensi, bukan otomatis sebagai tambahan penerimaan negara. Namun secara kebijakan, arahnya jelas: ruang fiskal tidak hanya dicari dari peningkatan pendapatan atau tambahan pembiayaan, tetapi juga dari pengurangan pemborosan.

Bagi dunia usaha, pendekatan ini dapat menciptakan perubahan penting. Digitalisasi pengadaan, standardisasi spesifikasi, konsolidasi volume, dan proses yang lebih transparan berpotensi menciptakan pasar pemerintah yang lebih terintegrasi sekaligus meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha.

Mengubah Kekayaan Alam Menjadi Nilai Tambah

Dimensi lain yang sangat menonjol adalah upaya meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam. Pemerintah berencana mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK. Salah satu tujuan utamanya adalah membangun Indonesia *Reference Price* bagi komoditas ekspor utama. Pemerintah ingin membangun pasar yang lebih dalam, transparan, dan likuid, dengan data transaksi yang lebih terang.

Dari perspektif ekonomi, langkah ini menarik karena menyentuh aspek yang lebih fundamental daripada sekadar meningkatkan volume ekspor. Indonesia berupaya memperbesar posisi dalam pembentukan harga dan pengelolaan transaksi komoditas.

Arah yang sama terlihat dalam kebijakan hilirisasi dan optimalisasi aset BUMN. Pemerintah membuka ruang kerja sama pemanfaatan aset BUMN yang belum optimal dengan swasta, dengan prinsip terbuka, kompetitif, dan akuntabel, sembari mempertahankan kepemilikan strategis negara.

Dengan demikian, agenda transformasi ekonomi 2027 bergerak dari paradigma *resource-based economy* menuju ekonomi yang berusaha menangkap nilai tambah lebih besar di dalam negeri.

Sektor Keuangan Mendapat Peran yang Lebih Strategis

Bagi industri keuangan, salah satu perkembangan paling relevan adalah rencana pengembangan Indonesia Financial Center (Pusat Finansial Internasional Indonesia/PFII) di Jakarta dan Bali.

PFII diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Ekosistem yang dirancang mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, *bullion, fintech*, keuangan syariah, *family office, treasury center*, hingga manajemen investasi.

Jika agenda tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, implikasinya tidak terbatas pada pembentukan kawasan baru. PFII mencerminkan ambisi untuk memperdalam fungsi Indonesia sebagai pusat intermediasi dan pengelolaan modal di kawasan.

Bagi perbankan nasional, perkembangan tersebut membuka peluang sekaligus tuntutan. Perbankan dapat memainkan peran lebih besar dalam pembiayaan investasi, pengembangan industri, transaksi lintas batas, *treasury*, pembiayaan proyek, dan ekosistem ekonomi digital.

Namun, pendalaman sektor keuangan juga membutuhkan fondasi yang kuat: tata kelola, manajemen risiko, transparansi, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum. Semakin besar ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan, semakin tinggi pula standar yang harus dipenuhi.

Pembiayaan Inovatif dan Peran Modal Jangka Panjang

RAPBN 2027 juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Danantara Development Management Fund atau DDMF diarahkan sebagai instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum selalu dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

Pemerintah menyebut sejumlah proyek seperti mobil nasional, motor nasional, dan Giant Sea Wall sebagai contoh proyek yang dapat dibiayai melalui instrumen tersebut. Kerangka ini memperlihatkan kebutuhan akan *patient capital*—modal yang mampu berorientasi lebih panjang dibandingkan pembiayaan komersial biasa.

Bagi sektor perbankan, perkembangan tersebut berpotensi memperluas ekosistem pembiayaan apabila proyek-proyek strategis semakin bankable dan memiliki struktur risiko yang jelas. Pada saat yang sama, perbankan perlu membaca perubahan struktur pembiayaan pembangunan: tidak semua kebutuhan modal harus bertumpu pada APBN atau kredit perbankan secara langsung.

Tantangan Utama: Eksekusi dan Produktivitas

Pada akhirnya, keberhasilan RAPBN 2027 akan sangat ditentukan oleh eksekusi. Pemerintah sendiri menekankan bahwa disiplin fiskal tidak berhenti pada saat anggaran disahkan, tetapi harus hadir sampai pada pelaksanaan setiap rupiah yang dibelanjakan. Presiden juga menegaskan bahwa tidak boleh ada proyek yang besar dari sisi anggaran tetapi kecil manfaatnya, insentif tanpa penciptaan pekerjaan baru, ataupun investasi tanpa transfer teknologi.

Ini merupakan titik kritis dari seluruh desain kebijakan ekonomi 2027. Target pertumbuhan 6%, penurunan kemiskinan menjadi 6,0–6,5%, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87%, serta perbaikan Rasio Gini menjadi 0,362–0,367 membutuhkan lebih dari sekadar tambahan anggaran. Pemerintah membutuhkan produktivitas belanja, koordinasi antarlembaga, kualitas proyek, serta respons dunia usaha dan sektor keuangan yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi aktivitas ekonomi.

Dalam konteks itu, pembaruan data ekonomi juga menjadi elemen penting. Pemerintah mengaitkan hasil Sensus Ekonomi 2026 dengan pembaruan perhitungan aktivitas ekonomi dan pemutakhiran DTSEN. Data yang lebih baik diharapkan menjadi basis penyusunan kebijakan dan anggaran yang lebih tepat.

2027, Tahun Pengujian Transformasi

RAPBN 2027 pada dasarnya menawarkan sebuah kontrak kebijakan: negara tetap ekspansif dalam mendorong pertumbuhan, tetapi semakin menuntut efisiensi, produktivitas, dan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Arah ini membuat 2027 berpotensi menjadi tahun penting bagi konsolidasi agenda transformasi ekonomi. Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi juga berupaya mengubah struktur sumber pertumbuhan—dari ketergantungan pada konsumsi dan komoditas menuju hilirisasi, industrialisasi, investasi, pendalaman pasar keuangan, energi baru, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagi sektor perbankan, konsekuensinya adalah semakin besarnya kebutuhan untuk menjadi bagian dari agenda transformasi tersebut. Pembiayaan UMKM, investasi industri, proyek infrastruktur, ekonomi hijau, digitalisasi, perdagangan komoditas, hingga pengembangan pusat keuangan akan membutuhkan intermediasi yang semakin inovatif sekaligus prudent.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 bukan semata apakah angka defisit tetap berada di bawah batas yang ditetapkan atau apakah pertumbuhan mencapai target. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah tambahan ruang fiskal, investasi, dan pembiayaan mampu menghasilkan kapasitas produktif baru, pekerjaan baru, nilai tambah yang lebih tinggi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti ditegaskan dalam pidato Presiden, APBN adalah alat perjuangan. Karena itu, tantangan terbesar 2027 bukan hanya menyediakan anggaran, melainkan memastikan anggaran tersebut benar-benar berubah menjadi produktivitas dan kesejahteraan. (**)

RAPBN 2027

Babak Baru Intermediasi Perbankan: Mengawal Pembiayaan Transformasi Ekonomi

RAPBN 2027 membawa implikasi yang cukup luas bagi industri perbankan. Bukan semata karena anggaran negara kembali diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi karena desain kebijakannya menempatkan sektor keuangan sebagai salah satu penggerak utama transformasi ekonomi.

Dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026, Presiden menekankan bahwa kebijakan fiskal akan ditempuh secara ekspansif, tetapi tetap kolaboratif, terarah dan terukur. Pemerintah juga menekankan sinergi fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara untuk mendorong pertumbuhan berbasis produktivitas, nilai tambah dan investasi.

Bagi perbankan, arah tersebut berarti satu hal penting: ruang pertumbuhan kredit pada 2027 tidak hanya datang dari meningkatnya permintaan pembiayaan, tetapi juga dari bergesernya struktur ekonomi menuju sektor-sektor yang menjadi prioritas transformasi.

Momentum Kuat

Fondasi awal industri perbankan memasuki 2027 relatif solid. Data OJK menunjukkan kredit perbankan pada Juli 2026 telah mencapai Rp9.135 triliun, tumbuh 13,58% secara tahunan, meningkat dari 12,67% pada Juni. Yang menarik, pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang mencapai 25,13%, disusul kredit modal kerja 11,04% dan kredit konsumsi 5,38%.

Dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh 22,10%, sementara kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 1,62%. Kredit bank BUMN bahkan tumbuh 16,95%.

Komposisi tersebut memberikan indikasi penting bagi 2027. Pertumbuhan kredit mulai lebih kuat pada pembiayaan yang berkaitan dengan ekspansi kapasitas produksi dan investasi, bukan hanya konsumsi. Ini sejalan dengan arah RAPBN yang menginginkan transformasi struktur ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan ekonomi rakyat.

Dengan kata lain, RAPBN 2027 berpotensi memperpanjang momentum pertumbuhan kredit investasi, sepanjang proyek pemerintah dan swasta bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi.

Ekspansi Fiskal dan Efek ke Likuiditas

RAPBN 2027 menetapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426,0 triliun dan defisit 2,40% terhadap PDB. Pemerintah menyebut desain anggaran tersebut sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ekspansif, namun tetap memperhatikan kesinambungan dan kualitas belanja.

Bagi perbankan, ekspansi fiskal dapat bekerja melalui beberapa jalur. Belanja pemerintah yang meningkat akan masuk ke perekonomian melalui proyek, pembayaran kepada kontraktor, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun program prioritas. Sebagian dana tersebut pada akhirnya menjadi deposito dan giro di sistem perbankan, sebelum kembali menjadi sumber pembiayaan.

Data hingga Juli 2026 menunjukkan DPK perbankan tumbuh 11,21% menjadi Rp10.336 triliun. Pertumbuhan deposito mencapai 13,13%, giro 11,81% dan tabungan 8,37%. Pada saat yang sama, rasio alat likuid terhadap DPK mencapai 23,10% dan LCR 187,5%, menunjukkan bantalan likuiditas masih memadai.

Namun, akselerasi kredit yang lebih cepat daripada DPK juga perlu menjadi perhatian. Bagi bank, tantangan 2027 bukan hanya bagaimana menyalurkan kredit, tetapi memastikan *funding structure* mampu menopang pertumbuhan aset secara berkelanjutan. Pendalaman dana murah, diversifikasi sumber pendanaan, penguatan pasar surat utang dan manajemen *asset-liability* akan menjadi semakin penting.

Hal ini terutama relevan ketika RAPBN mendorong investasi jangka panjang. Pembiayaan proyek berjangka panjang tidak ideal apabila sepenuhnya ditopang sumber dana jangka pendek.

Program Perumahan: Ruang Pertumbuhan Berbasis Permintaan

Sektor perumahan menjadi salah satu area yang berpotensi memperoleh efek ganda dari RAPBN 2027. Pemerintah menempatkan pembangunan dan renovasi perumahan sebagai bagian dari agenda prioritas, sementara ekosistem pembiayaan perumahan terus diperkuat. Survei Bank Indonesia menunjukkan KPR masih menjadi sumber pembiayaan utama pembelian rumah di pasar primer. Pada triwulan II 2026, sekitar 70,05% pembelian rumah primer dilakukan melalui KPR. Namun, penjualan properti masih terkontraksi 2,36% yoy meskipun membaik dibandingkan kontraksi 25,67% pada triwulan sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa peluang KPR cukup besar, tetapi tidak otomatis berarti pertumbuhan kredit perumahan akan melonjak. Daya beli, harga rumah, suku bunga, uang muka, serta kepastian proyek menjadi faktor yang menentukan.

Karena itu, agenda perumahan dalam RAPBN 2027 dapat menciptakan peluang yang lebih luas daripada sekadar KPR konsumen. Bank juga berpotensi memperbesar pembiayaan *supply side:* developer, kontraktor, material bangunan, hingga UMKM yang masuk dalam rantai pasok perumahan.

Optimalisasi SLIK yang diluncurkan OJK pada 2026 juga diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan UMKM dan Program 3 Juta Rumah, antara lain melalui peningkatan kualitas informasi debitur.

KUR: Memperkuat Ekosistem UMKM

Dimensi lain yang penting adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 22 Juli 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp169 triliun kepada sekitar 2,65 juta debitur. Sekitar 1,1 juta merupakan debitur baru yang pertama kali memperoleh akses pembiayaan formal, sementara 511 ribu pelaku UMKM tercatat naik kelas. Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR 2026 sebesar Rp290 triliun.

Data OJK juga menunjukkan kredit UMKM perbankan mencapai Rp1.519,35 triliun pada Juni 2026 dan tumbuh 1,21% yoy. Secara keseluruhan, pembiayaan UMKM

lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun, dengan perbankan menyumbang 82,44% dari total pembiayaan tersebut.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran bank dalam agenda ekonomi kerakyatan. Tetapi RAPBN 2027 memberikan tantangan baru: pembiayaan UMKM perlu semakin terhubung dengan sektor produktif dan rantai pasok prioritas.

KUR ke depan tidak cukup dilihat dari nominal penyaluran. Ukuran keberhasilannya semakin terkait dengan apakah debitur dapat meningkatkan kapasitas produksi, masuk rantai pasok formal, melakukan digitalisasi, melakukan ekspansi dan akhirnya bertransisi ke kredit komersial.

Dengan demikian, bank memiliki peluang mengembangkan *pipeline* nasabah jangka panjang, bukan hanya menyalurkan kredit bersubsidi.

MBG dan Segmen Pembiayaan Baru

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan contoh bagaimana program pemerintah dapat menciptakan kebutuhan pembiayaan baru di sektor riil. Ekosistem MBG bukan hanya mengenai pembiayaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi mencakup rantai pasok bahan pangan, petani, peternak, nelayan, distributor, jasa logistik, pengolahan makanan, hingga layanan pembayaran.

Pada awal 2026, Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, telah menyalurkan pembiayaan Rp198 miliar kepada sekitar 211 dapur MBG hingga triwulan I. BSI juga menyediakan *virtual account* dan *cash-management system* untuk mendukung operasional SPPG.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) telah menyalurkan kredit investasi Rp53,5 miliar untuk pembangunan 24 dapur SPPG hingga Mei 2026.

OJK sendiri telah menempatkan pembiayaan rantai pasok MBG dan ketahanan pangan sebagai salah satu area yang perlu dikembangkan, termasuk melalui penguatan ekosistem pembiayaan komoditas daerah.

Ini menunjukkan peluang yang lebih besar bagi industri perbankan: membiayai ekosistem di belakang program pemerintah, bukan hanya membiayai entitas pelaksana program.

Hilirisasi dan Investasi: Potensi Terbesar Kredit Produktif

Agenda transformasi RAPBN 2027 juga membuka ruang besar bagi kredit investasi. Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah lebih tinggi, hilirisasi, industrialisasi, pengembangan energi baru, optimalisasi aset negara dan penguatan infrastruktur.

Salah satu agenda penting adalah pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya dan penghentian 13 GW pembangkit diesel, yang menurut pemerintah berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp73,9 triliun per tahun. Pemerintah juga menyiapkan *Strategic Mineral and Commodity Exchange* dan Indonesia *Reference Price* untuk memperkuat transparansi serta pembentukan harga komoditas strategis.

Bagi bank, agenda tersebut menciptakan potensi pembiayaan proyek, modal kerja, *trade finance, supply-chain finance, cash management,* hingga pembiayaan berkelanjutan.

Lebih jauh, pembentukan Indonesia *Financial Center* (PFII) dan pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang akan memperluas kemungkinan kolaborasi antara bank dan pasar modal.

Inilah implikasi strategis RAPBN 2027 bagi industri perbankan. Peran bank berpotensi bergerak dari sekadar lender menjadi financial partner dalam transformasi ekonomi. Peluang tersebut mencakup pembiayaan investasi, KPR dan ekosistem perumahan, KUR dan UMKM, ketahanan pangan, MBG, energi terbarukan, hilirisasi, perdagangan komoditas, digitalisasi hingga proyek-proyek jangka panjang.

Fondasinya cukup kuat. Perbankan memiliki kredit Rp9.135 triliun, pertumbuhan kredit 13,58%, DPK Rp10.336 triliun, LCR 187,5%, CAR 23,84%, serta NPL gross 2,10% pada Juli 2026.

Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut tetap berkualitas. RAPBN 2027 sendiri menekankan pentingnya efisiensi, produktivitas, data yang lebih baik dan belanja yang terukur. Pemerintah bahkan memperkirakan potensi efisiensi dari konsolidasi pengadaan dapat mencapai sekitar Rp360 triliun.

Dengan demikian, tahun 2027 bukan hanya soal seberapa tinggi kredit tumbuh. Yang lebih penting adalah ke mana kredit mengalir, bagaimana kredit tersebut menciptakan aktivitas ekonomi baru, dan sejauh mana perbankan dapat menjadi penghubung antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kebutuhan pembiayaan dunia usaha.

Di titik inilah RAPBN 2027 dapat menjadi momentum bagi industri perbankan untuk memperluas fungsi intermediasi: dari membiayai aktivitas ekonomi yang sudah ada menjadi ikut membiayai transformasi ekonomi Indonesia. (*)

Peran PFII dan Arah Strategis Perbankan Nasional

PERBANAS NEWS – Arsitektur keuangan Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan disahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia. *Beleid* ini diharapkan memperkuat posisi tawar Indonesia di ekosistem ekonomi dunia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII). Keputusan yang diketuk dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 21 Juli 2026 ini, bukan sekadar ketetapan administratif saja, melainkan sebuah lompatan yang dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan modal dan hub finansial utama di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik.

Dari perspektif pemerintah dan otoritas fiskal, pengesahan regulasi ini merupakan langkah strategis dan sangat esensial. UU PFII diposisikan sebagai katalis utama pendalaman pasar uang (*financial market deepening*), sebuah isu struktural yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bagi perekonomian nasional. Dengan adanya pusat finansial bertaraf internasional, ruang untuk diversifikasi instrumen keuangan akan terbuka lebar.
Hal ini akan berimbas secara langsung terhadap perluasan sumber-sumber pembiayaan di luar jalur konvensional, serta mendorong akselerasi peningkatan investasi—baik dalam bentuk investasi asing langsung *(Foreign Direct Investment*/FDI) maupun investasi portofolio—yang masuk ke dalam negeri dengan kepastian hukum yang jauh lebih terjamin.

Landasan Hukum dan Otonomi Kelembagaan dalam P2SK

Untuk membedah kedalaman dari regulasi baru ini, perlu menelusuri fondasi hukum yang menjadi rahim kelahiran pusat keuangan dunia ini. Secara yuridis, UU PFII merupakan bentuk dari amanat Pasal 248A UU No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Reformasi struktural yang dibawa oleh UU P2SK memberikan mandat bahwa penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak bisa sekadar disisipkan dalam aturan umum, melainkan diatur melalui UU tersendiri yang bersifat lex specialis.

Melalui beleid khusus ini, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pengaturan yang rigid sekaligus fleksibel mengenai pembentukan wilayah PFII. Wilayah ini nantinya tidak hanya didefinisikan secara geografis, tetapi juga memiliki kekhususan yurisdiksi tertentu.

Kekhususan tersebut wajib didukung oleh struktur kelembagaan yang sangat independen dan berstandar internasional. Independensi ini merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan objektivitas, meminimalisasi intervensi birokrasi, dan menumbuhkan kepercayaan penuh dari para pelaku pasar modal global.

Tujuan akhirnya adalah untuk mendukung secara penuh berbagai aktivitas sektor keuangan tingkat tinggi dan kegiatan usaha dari berbagai korporasi mutinasional yang berorientasi lintas batas negara.

Poin-poin Fundamental Pengaturan dalam UU PFII

Untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi para pelaku industri perbankan dan *stakeholder* keuangan, berikut adalah rincian aspek strategis yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang kini telah disahkan menjadi UU:

No	Aspek Strategis	Rincian Pengaturan dalam UU PFII
1	Pembentukan Wilayah dan Kelembagaan	Penentuan delineasi wilayah khusus PFII yang didukung oleh otoritas pengelola berstatus independen. Otoritas ini diberi kewenangan untuk merumuskan standar tata kelola operasional yang selaras dengan best practice dari pusat finansial terkemuka di dunia.
2	Kegiatan Usaha Berorientasi Global	Relaksasi dan pemberian ruang gerak yang luas bagi lembaga keuangan dan korporasi untuk menjalankan operasi, transaksi modal, dan penerbitan instrumen investasi yang target pasarnya adalah investor maupun debitur di tingkat global.
3	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Pembentukan kerangka resolusi konflik yang cepat, pasti, dan berstandar internasional (termasuk opsi arbitrase global) untuk memberikan rasa aman kepada para investor asing yang menempatkan dananya di wilayah PFII.
4	Pemberian Fasilitas Perpajakan	Insentif fiskal khusus yang dirancang untuk menyaingi hub keuangan negara tetangga, yang dapat mencakup skema tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan pajak atas instrumen atau dividen tertentu demi mendongkrak daya tarik investasi.
5	Fasilitas Khusus Penunjang Lainnya	Penjaminan atas kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang meliputi fleksibilitas aturan ketenagakerjaan bagi talenta asing/ekspatriat profesional, kemudahan imigrasi, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi tingkat dewa (world-class IT infrastructure).

Mengurai Efek Ganda

Ekspektasi yang diletakkan di pundak PFII sangatlah besar. Kehadiran pusat finansial ini diharapkan mampu menambal celah pembiayaan (*financing gap*) pada sektor-sektor krusial. Salah satu target utamanya adalah untuk mendukung secara penuh pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang padat modal.

Selama ini, ketergantungan pembiayaan infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap membuat ruang fiskal menjadi sempit. Dengan PFII, proyek-proyek raksasa tersebut kini dapat mengakses pool of capital dari investor institusional global secara lebih efisien dan terstruktur.

Selain itu, PFII juga didesain untuk merespons tren makroekonomi masa depan. Pembiayaan berwawasan lingkungan seperti ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) diyakini akan mendapatkan momentum percepatan di kawasan ini.

Begitu pula dengan sektor keuangan syariah dan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*). Penggabungan antara instrumen syariah global—seperti penerbitan Sukuk Korporasi Internasional—dan inovasi *fintech* lintas batas akan menjadi daya tarik eksklusif yang membedakan PFII dengan pusat keuangan lainnya.

Semua ini pada akhirnya ditujukan untuk mempercepat transformasi industri nasional, menggeser paradigma dari sekadar eksportir komoditas mentah menjadi pusat nilai tambah ekonomi.

Tentu saja, keberadaan pusat keuangan berskala raksasa acapkali memunculkan skeptisisme mengenai eksklusivitas yang hanya menguntungkan sektor moneter (perbankan dan pasar modal) semata.
Menjawab kekhawatiran ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebelum diganti Suahasil Nazara, sempat memberikan penegasan yang menjadi guideline utama dari implementasi UU PFII. Dia menyampaikan bahwa tujuan dari PFII bukan sekadar untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan di dalam satu menara gading.
Lebih jauh dari itu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa PFII dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan di sektor riil. "Likuiditas masif yang terpusat di kawasan PFII harus mampu ditransmisikan menjadi kredit sindikasi, penerbitan obligasi, dan pembiayaan ekuitas bagi korporasi-korporasi manufaktur, logistik, dan jasa di seluruh Indonesia."

Proses hilirisasi dana inilah yang akan mendorong peningkatan investasi produktif di lapangan. Apabila investasi produktif berjalan pesat, maka efek dominonya akan bermuara pada penciptaan lapangan kerja secara masif, menekan tingkat pengangguran, dan pada akhirnya, memperkuat fundamental pertumbuhan ekonomi nasional.

Implikasi bagi Perbankan

Bagi kalangan industri perbankan domestik, utamanya yang bernaung di bawah bendera PERBANAS, pengesahan UU PFII adalah momentum *wake-up call*. Era ini mensyaratkan bank-bank lokal untuk naik kelas, tidak hanya puas beroperasi di kolam domestik, tetapi harus siap menyelam di samudra persaingan global.

Sekjen Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Anika Faisal menyampaikan perbankan nasional harus segera meracik strategi mitigasi risiko devisa, meningkatkan kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR), serta melakukan kalibrasi ulang terhadap kesiapan teknologi sistem pembayaran mereka agar kompatibel dengan sistem pelaporan internasional.

Lebih lanjut, sambungnya, integrasi antara divisi corporate banking dan investment banking harus semakin dipertajam. "Anggota PERBANAS berpotensi besar untuk bertindak sebagai *arranger, underwriter*, maupun agen kustodian yang menjembatani klien korporasi domestik dengan para pengelola dana global di PFII," terangnya.

Pada akhirnya, regulasi yang ideal ini harus disambut dengan kesiapan eksekusi yang tepat agar visi besar membawa Indonesia ke kasta tertinggi ekosistem keuangan dunia dapat benar-benar terealisasi. (*)

Srikandi Nakhoda Baru Bank Indonesia: Menjaga Stabilitas Moneter dan Bersinergi dengan Bank Nasional

PERBANAS NEWS — Sejarah baru telah terukir di lanskap otoritas moneter Indonesia. Dinding kaca (*glass ceiling*) terpecahkan oleh seorang Srikandi setelah puluhan tahun pucuk pimpinan Bank Indonesia dipegang kaum adam.

Adalah Destry Damayanti, yang ditetapkan oleh Komisi XI DPR sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 pada Kamis (27/8/2026) setelah secara marathon melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Pada waktu bersamaan ditetapkan Aida S Budiman pengganti Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Selain itu, Solikin M. Juhro ditetapkan sebagai pengganti Aida di kursi Deputi Gubernur BI.
Keputusan ini tidak hanya menjadi tonggak penting bagi representasi kepemimpinan perempuan di sektor makroekonomi nasional, tetapi juga membawa angin segar bagi industri perbankan yang menantikan kesinambungan bauran kebijakan (*policy mix*) di tengah dinamika ekonomi global.

Sebagai satu-satunya calon yang diajukan untuk mengisi posisi strategis tersebut. Penetapan Destry merupakan kulminasi dari rekam jejak panjangnya di pusaran pengambilan kebijakan lintas sektoral industri keuangan.

Masa transisi kepemimpinan di Bank Indonesia sejatinya telah berjalan ketika Destry ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI sejak 27 Juli 2026, menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo pada waktu yang bersamaan.

Transisi yang nyaris tanpa gejolak ini memberikan sinyal bahwa organisasi bank sentral cukup kredibel di pasar keuangan. Hal itu juga memastikan bahwa pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah tetap berjalan pada jalurnya.

Kematangan Destry dalam menavigasi turbulensi ekonomi dibangun di atas fondasi akademis dan jam terbang sebagai praktisi. Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dan magister *Regional Science* dari Cornell University ini memiliki rekam jejak yang Panjang. Mulai dari Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris (2000–2003), Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas (2005–2011), hingga Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2011–2015).
Kemampuan menjaga stabilitas sistem keuangan semakin teruji saat dia memimpin Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN (2014–2015) dan menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015–2019, sebelum akhirnya berlabuh sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019. Insting krisis dan pemahamannya terhadap mitigasi risiko perbankan inilah yang menjadi jangkar keyakinan pasar.

Visi, Misi, dan Inisiatif Perbankan Nasional

Dalam paparan di hadapan parlemen, Destry merumuskan kerangka kerja yang tidak hanya berfokus pada penjagaan nilai tukar, tetapi juga menyentuh langsung denyut nadi operasional intermediasi perbankan nasional.

Fokus utamanya adalah memastikan likuiditas perbankan tetap memadai untuk memacu ekspansi kredit ke sektor riil, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

Beberapa inisiatif strategis yang ditekankan mencakup pendalaman pasar uang (*money market deepening*), perluasan insentif likuiditas makroprudensial (KLMAC) untuk sektor prioritas dan UMKM, serta akselerasi integrasi sistem pembayaran digital (termasuk ekspansi BI-FAST dan QRIS *cross-border*) yang akan memberikan efisiensi operasional bagi perbankan.
Menurut Sekjen Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Anika Faisal, bagi PERBANAS dan seluruh ekosistem perbankan, era kepemimpinan baru ini membuka peluang penguatan kolaborasi yang lebih erat ke depan.

Berikut adalah ringkasan kerangka Visi dan Misi yang diusung oleh Destry Damayanti untuk menakhodai Bank Indonesia 5 tahun ke depan:

Elemen	Rincian Arah Kebijakan
Visi Utama	Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap stabilitas makroekonomi nasional, pertumbuhan yang inklusif, dan resiliensi sistem keuangan Indonesia.
Misi 1: Moneter	Memperkuat efektivitas bauran kebijakan (mix policy) untuk memastikan inflasi terkendali sesuai sasaran dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah volatilitas global.
Misi 2: Makroprudensial	Mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor prioritas, padat karya, dan pembiayaan hijau (green financing).
Misi 3: Sistem Pembayaran	Mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional yang efisien dan interoperable, serta mematangkan peta jalan pengembangan Rupiah Digital (CBDC).
Misi 4: Pendalaman Pasar	Mempercepat pendalaman pasar keuangan nasional untuk menciptakan alternatif instrumen pembiayaan pembangunan dan pengelolaan likuiditas perbankan yang fleksibel.
Misi 5: Sinergi Kelembagaan	Memperkuat sinergi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memitigasi risiko sistemik.

"Profil Ibu Destry yang multidimensi menjadikannya figur paripurna, dia tidak sekadar merumuskan teori moneter di atas kertas, tetapi juga memahami secara presisi bagaimana transmisi kebijakan tersebut memengaruhi neraca perbankan dan biaya dana (*cost of fund*) di lapangan," ujarnya.

Mendobrak *"Glass Ceiling"* Otoritas Moneter

Penetapan Destry Damayanti juga sejalan dengan tren progresif di lanskap perekonomian global. Sepanjang sejarah yang didominasi oleh figur laki-laki, dalam beberapa dekade terakhir telah menyaksikan akselerasi kepemimpinan perempuan di berbagai bank sentral utama.

Berdasarkan publikasi riset Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) dan Dana Moneter Internasional (IMF), jumlah perempuan yang menduduki posisi tertinggi bank sentral mencatatkan rekor pada kurun 2024–2025, yakni sekitar 30 perempuan dari total 185 bank sentral di seluruh dunia.

Kendati angka ini baru mencakup sekitar 16% dari total otoritas moneter global, trennya terus mendaki. Dengan terpilihnya Destry, Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam gelombang kepemimpinan perempuan di bank sentral.

Keterlibatan perempuan bukan sekadar pemenuhan kuota keberagaman. Riset IMF menunjukkan bahwa dewan gubernur dengan keberagaman gender cenderung memiliki pendekatan analisis risiko yang lebih holistik.

Kepemimpinan yang inklusif secara empiris meningkatkan ketahanan bank serta efektivitas komunikasi kebijakan dalam menjangkar ekspektasi inflasi di pasar. Data OMFIF menyoroti bahwa banyak talenta perempuan masih tertahan di posisi deputi akibat rigiditas kelembagaan, serta tingginya tingkat penyusutan di jenjang manajemen menengah bank sentral.

Namun, menguatnya kesadaran global terhadap nilai *environmental, social, and governance* (ESG) mendesak bank sentral untuk bertindak lebih transparan. Kepemimpinan perempuan di institusi moneter bukan lagi sebatas eksperimen representasi. Namun, efektivitas kebijakan sama sekali tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kecakapan analitis dan independensi dalam menavigasi ekonomi.

Kehadiran sosok sekaliber Destry Damayanti di kursi Gubernur Bank Indonesia menjadi bukti nyata bahwa ekosistem keuangan nasional telah mencapai tingkat kematangan inklusif yang tinggi. Harapan besar kini disandarkan pada pundak sang nakhoda baru dalam meramu kebijakan moneter yang solid dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. (*)

Berikut adalah daftar 30 tokoh perempuan yang saat ini menjabat maupun yang pernah mencatat sejarah memimpin otoritas moneter di negaranya masing-masing di seluruh dunia:

No.	Nama Pimpinan	Otoritas Moneter & Negara	Masa Jabatan
1	Christine Lagarde	European Central Bank (ECB)	2019–Sekarang
2	Elvira Nabiullina	Central Bank of Russia	2013–Sekarang
3	Michele Bullock	Reserve Bank of Australia	2023–Sekarang
4	Victoria Rodríguez Ceja	Bank of Mexico	2022–Sekarang
5	Rosanna Costa	Central Bank of Chile	2022–Sekarang
6	Jasmina Selimović	Central Bank of Bosnia and Herzegovina	2024–Sekarang
7	Elizabeth Genia	Bank of Papua New Guinea	2024–Sekarang
8	Chea Serey	National Bank of Cambodia	2023–Sekarang
9	Natia Turnava	National Bank of Georgia	2025–Sekarang
10	Anca Dragu	National Bank of Moldova	2023–Sekarang
11	Irena Radović	Central Bank of Montenegro	2023–Sekarang
12	Malangu Kabedi Mbuyi	Central Bank of the Congo (DRC)	2021–Sekarang
13	Jorgovanka Tabaković	National Bank of Serbia	2012–Sekarang
14	Caroline Abel	Central Bank of Seychelles	2012–Sekarang
15	Anita Angelovska Bezhoska	National Bank of North Macedonia	2018–Sekarang
16	Catia Tomasetti	Central Bank of San Marino	2018–Sekarang
17	Jeanette R. Semeleer	Central Bank of Aruba	2008–Sekarang
18	Cindy Scotland	Cayman Islands Monetary Authority	2002–Sekarang
19	Maiava Ainuu-Enari	Central Bank of Samoa	2011–Sekarang
20	Maysaa Sabreen	Central Bank of Syria	2024–2025
21	Vathana Dalaloy	Bank of the Lao PDR	2025–Sekarang
22	Irma Margarita M. Castrillón	Central Bank of Cuba	2017–Sekarang
23	Beth Hammack	Federal Reserve Bank of Cleveland	2024–Sekarang
24	Hafize Gaye Erkan	Central Bank of the Republic of Turkey	2023–2024
25	Janet Yellen	Federal Reserve (AS)	2014–2018
26	Zeti Akhtar Aziz	Bank Negara Malaysia	2000–2016
27	Karnit Flug	Bank of Israel	2013–2018
28	Retselisitsoe Matlanyane	Central Bank of Lesotho	2012–2021
29	Mercedes Marcó del Pont	Central Bank of Argentina	2010–2013
30	Linah Mohohlo	Bank of Botswana	1999–2016

PIUTANG YANG NYATA - NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(BANK JATENG)

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009 dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto pada tahap II Tahun 2026 sebagai berikut :

TAHUN 2026 (KONVENSIONAL) TAHAP II : Rp. 39.827.490.880,-
UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2026 TAHAP II : 121.319.659,-

Rincian Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang bersamaan dengan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2026.

Informasi Penting Kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih :

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kepada Debitur yang terkait di **Bank Jateng** agar masing-masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. **Bank Jateng** senantiasa memenuhi Undang - Undang Perpajakan dan Undang –Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank Jateng** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank Jateng** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini;
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank Jateng** di tahun 2026. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan;
4. **Bank Jateng** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan;
5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank Jateng**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Pituang yang Nyata – Nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi Bank Jateng, maka masing-masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)

TAHUN 2026 TAHAP II - KONVENSIONAL

(Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015)

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.
1	SUHARTINI	205.141.386
2	P RINI WIDAYATI	185.532.627
3	TARSISIUS HARTONO	298.284.390
4	SOLIKHUN	477.959.685
5	SRI SOEYATI	109.738.677
6	SABIKHUN NAHAR	229.936.966
7	PUJIYONO	279.130.117
8	FAUZI	222.770.590
9	RESTIWI RAHAYU CH	184.326.810
10	SAMINAH	188.036.320
11	MARGO PITOYO	183.719.315
12	AJAR PRAMBUDI	219.598.580
13	SUSIYONO	218.519.586
14	YUNAEDI	203.826.360
15	SETIYATI	186.592.780
16	SURYADI	217.543.420
17	ISTANTO	213.968.144
18	TURIMAN RIYANTO	202.532.854
19	HARWANTO	195.445.650
20	SITI WASTINI	187.187.264
21	AGUS SETYO WIDODO	197.847.468
22	SLAMET RIYANTO	193.533.138
23	SUKESI	123.437.066
24	INSAN KAMIL	181.270.310
25	LASMAN	208.712.084
26	URIP SUPRAYOGO	184.835.198
27	TOTOK MIYANTO	251.515.060
28	YOHANES BAMBANG SUTOPO SULISTY	200.444.810
29	SRI AMBARWATI	193.066.120
30	SUTRISNO	227.433.086
31	HENDRA SULISTIYANTO	214.972.130
32	SUPADI	198.831.802
33	SUNARTO	196.337.860
34	ARIS MUKHAROM	223.863.870
35	MARYANTO	203.152.820
36	ARIES SUHADI	231.259.666
37	SITI SUBIYARTI	161.064.730
38	RINI KARTIKA HADI AHMAWATI	261.789.960
39	EDI SUKAMTO	209.700.180
40	SUPARLI	190.826.876
41	NANIK SRI REJEKI	313.229.753
42	MOCH HARIADI SUPRAPTO	236.588.524
43	HERMAWAN	225.520.570
44	NURHADI	186.696.800
45	SULASTRI	1.000.000.000
46	SADIRUN	239.658.460
47	WARSITO	225.102.977
48	SRI INDARTI	206.821.585
49	SUWITO	202.403.420
50	UNTUNG BUDIMAN	251.429.706
51	DWI RUMAWATI	190.175.418
52	RUWIYO	203.200.440
53	SUTRISNO	328.511.289
54	DIRMAN	218.552.070
55	TASIYAH	184.399.109
56	SUSDIYANTO	215.051.351
57	NUR MUHAMMAD FAUZIE	231.106.059
58	ARIF SAEFUDIN	233.419.657
59	NARSO	228.886.130
60	RIYANTO	182.071.078
61	WIDOWATI	269.074.830
62	NUR KAYATI	236.793.072
63	SUBANDI	214.898.330
64	AHMAD EFFENDI ISKANDAR	201.274.824
65	ISTIFAIDAH	228.612.216
66	TRI AGUSTOMO	215.392.191
67	SUKASWITO	232.085.210
68	TOTOK DWI HARSONO	230.606.311
69	ROHADI	181.817.600
70	HADI RUSWANTO	185.320.640
71	SUJATMIKO	196.592.930
72	MATHOHIR	194.309.080
73	SRI HARINI	193.252.880
74	IRFAN	199.210.110
75	ALIEFIANDA WAHYU RAHMADIANTO	523.316.040
76	ABDUL FATAH	203.842.910
77	FAUZIA ISMAWATI	187.037.170
78	PRIH GITAYATI KUSUMA WARDHANY	200.170.500
79	NENI APRIASTUTI SUSARNO	442.830.740
80	HENGKY JEFRI SIREGAR	403.591.061
81	PUJI SULAKSONO	378.762.831
82	WIWIK HARTININGRUM	246.915.720
83	INDRA WAHYUDI	193.644.038
84	SRI HARYATI	211.547.460
85	PRIYO SASMOKO	216.290.580
86	HARDIYATMO	206.664.972
87	SUYONO	218.535.216
88	FAJAR ADI KURNIAWAN	184.598.350
89	HANDAYANI NUGROHO S	1.046.046.468
90	ISTAMBAH PRIYAMBODO	204.654.853
91	SUSENO	181.645.840
92	SURYANING BUDIYONO	240.403.050
93	LIA WIJAYATI	217.768.241
94	BUDI WIDYARSO	231.541.130
95	RITA WIDYANDINI	219.571.498
96	RAHMADI	194.967.840
97	SUPARYO	203.682.201
98	ARIF SURYAWAN	201.676.450
99	ZAENURI	281.074.510
100	TENTREM	214.724.017
101	HARNATI	221.635.725
102	SUGIARTA	195.885.690
103	RUBINI	196.163.650
104	SUNARYA	180.502.410
105	RIYANTO	231.641.860
106	SRI WIJAYATI	201.038.240
107	SARJOKO EDI PAMUNGKAS	189.497.880
108	IDHAM	186.585.720
109	MUGIYONO	211.705.200
110	ANIE RISWATI	209.356.606
111	JOKO RUYONO	198.950.804
112	PONIJAN	213.696.490
113	SUSILO SUBAGYO	198.558.710
114	SRI RAHAYU	466.363.353
115	BAMBANG PURNAWAN	410.280.828
116	SRI WIDAYATI	303.744.080
117	SUHARTONO	224.892.180
118	AGUS PRIYANTO	223.527.211
119	SETYO BUDI WALUYO	221.900.523
120	SUGIATMO	192.505.037
121	AMIN SETIYONO	241.158.954
122	WARYO	214.567.530
123	KISHARTO	207.571.536
124	MARWOTO	199.585.465
125	SRI KUSMIYARNI	197.634.748
126	FATIMAH	196.334.150
127	SULASTRI HANTATI	234.141.913
128	WARTONO	184.517.099
129	MAANI	357.206.664
130	TARYUMI	192.473.774
131	DEDE HARIS YUSANTARA	183.186.817
132	EDY PRIYADI	188.167.920
133	CHRISENSIANA SRININGSIH	223.299.847
134	MUSYADAD	212.231.432
135	ANDUNG HARIS PRIHASTOTO	260.353.190
136	SULISTYO	245.646.988
137	SUBUR	219.758.666
138	IMAM PRAYOGI	217.067.406
139	MUHAMAD CASMITO	190.179.918
140	AMAL SUWIRJANO	2.981.094.614
141	TRIYONO	228.591.730
142	IKA YULIA NURILAWATI	206.358.220
143	KARNOTO	216.997.205
144	KARTINI	222.832.590
145	UNTUNG PRABOWO	218.419.140
146	NASIRIN	213.503.251
147	ZAINUL UMAM	196.724.360
148	FAIZIN	184.704.594
149	WAHIB SUMARTARA	231.424.867
150	ERNA PRATATIWI	221.113.788
151	HENI DWI PURWANTI	210.019.722
152	SODIKIN	189.072.064
153	SAMINO	245.876.392
154	HENI HIDAYATI	212.446.923
155	MUDZAKIR	203.653.620
156	ZAINAL ALI MUKTI	415.045.637
157	NGADIMAN	192.670.899
158	SINGGIH RUSTIJONO	192.170.989
	TOTAL :	**39.827.490.880**

DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (BANK JATENG)

TAHUN 2026 TAHAP II - UNIT USAHA SYARIAH

(Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.207/PMK.010/2015)

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH RP.
1	WIWIEK PURWATININGSIH	47.772.455
2	REKO BUDIYONO	55.665.164
3	DIDI YULIANTO	17.882.040
	TOTAL :	**121.319.659**

CFO FORUM PERBANAS, 6-7 Agustus 2026

Kali ini dilaksanakan di Bandung dengan tema "*The Next Era of Finance".* Di tanggal 6 Agustus 2026 acara diisi dengan paparan mengenai Economic Outlook sekaligus Dinner dan Networking.

7 Agustus 2026, CFO dibuka secara resmi oleh Ibu Anika Faisal, Sekretaris Jenderal PERBANAS kemudian keynote oleh Bapak Indrato Budiwitono - Deputi Komisioner Pengasa Konglomerasi Keuangan dan Bank Swasta OJK, dilanjutjan Special Address oleh Bapak Edwin Gunawan Hutapea – Kepala Deapartemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI.

Narasumber dalam kesempatan tersebut Adalah perwakilan dari Gartner Singapaore, DBS Group Singapore, dan JP Morgan. CFO diakhiri dengan diskusi yang menjadi 4 group. Group Finance, *Operating Efficiency, Performance Steward for Value Creation,* dan *Organization and Talent*. Diskusi berlangsung seru dan penuh semangat. Di penghujung acara, Ibu Vera Eve Lim selaku Ketua Bidang Pajak, Keuangan, dan Regulatory Reporting PERBANAS/Direktur BCA menyampaikan *closing speech* dan *key takeaways.*

Pekan Olahraga Perbankan (Porbank)

PORBANK KEPRI, Ratusan insan perbankan di Batam mengikuti Pekan Olahraga Perbankan (Porbank) Kepri di Axton MB2 Batam pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Kegiatan dibuka oleh Bapak Agus H. Widodo, Pengurus Bidang Organisasi PERBANAS.

Penanaman Bibit Pohon 2 September 2026

Manado, 2 September 2026. PERBANAS melalui KMPP kembali melakukan aksi penghijauan di Kampus Univ. Klabat, Manado, Sulawesi Utara dengan total pohon 206. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua KMPP PERBANAS, Tribuana Tunggadewi beserta Bendahara PERBANAS, Dio Alexander Samsoeri, Direktur Eksekuif PERBANAS, Direktur Eksekutif Asbisindo, Pengurus PERBANAS Sulawesi Utara, dan Pelaksana Komite KMPP PERBANAS. Dari pihak kampus dihadiri Prof. Pdt. Danny Rantung, MBA, Phd beserta jajaran serta Ketua Yayasan Klabat. Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Weldy Poli. SP, MA.

Kegiatan Literasi Keuangan diselenggarakan oleh KMPP PERBANAS dan PERBANAS

3 SEPTEMBER 2026, Kegiatan Literasi Keuangan yang diselenggarakan oleh KMPP PERBANAS dan PERBANAS (dan PERBANAS Daerah Sulawesi Utara) bekerjsama dengan Universitas Klabat (Unklab-Manado) yang dihadiri lebih kurang 1.500 mahasiswa dan siswa SMA Unklab di Pioneer Chapel Unklab dengan mengusung tema "Smart Money, Safe Digital: Menjadi Mahasiswa Cerdas Finansial di Era Digital.

Bankir Berbagi: Mengalirkan Kebaikan, Menyalurkan Harapan untuk Sesama

PERBANAS berkolaborasi dengan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan didukung Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FEKDI) dan BARa (Bankers Association for Risk Management, serta LSP SJK (Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Jasa Keuangan) mengadakan giat Donor Darah "Bankir Berbagi: Mengalirkan Kebaikan, Menyalurkan Harapan untuk Sesama". Acara dilaksanakan pada 14 September 2026 di kampus PERBANAS Institute.

bankNTT
melayani lebih sungguh

PIUTANG YANG NYATA - NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
(“Bank NTT”)

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024, PMK Nomor 207/PMK.010/2015, PMK Nomor 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan & ketentuan terkait lainnya.

Dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (“Bank NTT”) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

September Tahun 2026 : Rp. 84.783.849.453,31

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2026.

Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata–Nyata Tidak Dapat Ditagih:

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di **Bank NTT**, agar masing–masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. **Bank NTT** senantiasa memenuhi Undang–Undang Perpajakan dan Undang–Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila **Bank NTT** dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada **Bank NTT** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini.
3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi **Bank NTT** di tahun pajak 2026. Demi keadilan, apabila piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan dan/atau menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan.
4. **Bank NTT** telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, & penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan.
5. Piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal **Bank NTT**. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku/Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi **Bank NTT**, maka masing–masing pihak wajib mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang–Undang beserta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia

PERBANAS INSTITUTE | UNGGUL | DIKTISAINTEK BERDAMPAK | CERTIFIED ISO 21001 | KAN

UPGRADE YOUR FUTURE

Penerimaan Mahasiswa Baru

Maret | Juli | November

BEASISWA HINGGA 25%*
untuk biaya pendidikan
*Syarat dan ketentuan berlaku.

PROGRAM PASCASARJANA PERBANAS INSTITUTE

PENDIDIKAN PROFESI
- Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)

PROGRAM MAGISTER
- Magister Akuntansi
- Magister Manajemen

PROGRAM DOKTOR
- Doktor Manajemen Berkelanjutan

KEUNGGULAN PERBANAS INSTITUTE

- Akreditasi Unggul BAN-PT
- Dosen Akademisi & Praktisi Industri
- Networking Profesional & Dunia Bisnis
- Kesempatan Kolaborasi Internasional

Daftar Sekarang:

admisi.perbanas.id

Info Lebih Lanjut:
0811 9990 997
(Halo Perbanas)
www.perbanas.id
perbanas.institute